



Rencana Tindak Pengendalian ( RTP )

TAHUN 2022

**DINAS SOSIAL DAN  
PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN  
DESA  
KABUPATEN BANYUMAS**



# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Dalam upayanya mendukung Visi dan Misi Bupati terpilih, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai APIP berkomitmen untuk mendukung untuk penyelenggaraan SPIP dengan baik. Untuk itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Inspektorat. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMD Tahun 2018-2023, Renstra, Renja maupun Perjajian Kinerja.

#### 1.1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RTP pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

#### 1.1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

#### 1.1.4. Manfaat

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;

- 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
- 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

#### 1.1.5. Ruang Lingkup

RTP ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP untuk tahun 2022 diprioritaskan pada kegiatan :

- (1) Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar sosial sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- (2) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan administrasi pemerintahan desa.
- (3) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan.

Penyusunan RTP Tahun 2021 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan karena pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Banyumas akan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### **2.3. Unsur-unsur SPIP**

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko dilakukan atas:

- Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah;
- Penilaian risiko strategis OPD; dan
- Penilaian risiko operasional/kegiatan OPD.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada kegiatan/tujuan pokok;

- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi Manajemen diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.

- Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.

2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)

Pasal 56 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah.

### **BAB III**

#### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

##### **3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

##### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan Hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Cukup memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Cukup memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Cukup memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Cukup memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Cukup memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup memadai

Berdasarkan hasil skoring dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian diketahui semua sub unsur ada pada kategori cukup memadai :

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggungjawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	<b>Penegakan integritas dan nilai etika</b>		
1.	Pembinaan dan penguatan mental dan disiplin pegawai	Kepala Dinas	Triwulan I 2022
2.	Meningkatkan kapasitas building pegawai melalui in house training	Kepala Dinas	Triwulan II 2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*

*Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Sosial dan*

*Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Banyumas*

*Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan  
Pengendalian Intern Dinas Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### 4.1. Penetapan Konteks/Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkat kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah
- b. Pengelolaan risiko strategis OPD; dan
- c. Pengelolaan risiko operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Bupati Banyumas Periode 2018-2023 telah menetapkan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD. Visi tersebut adalah “Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 8 (delapan) misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
- b. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
- c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- e. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;

h. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Kedelapan misi tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas sebagai Aparatur di bidang Sosial dan pemberdayaan masyarakat dan desa mendukung misi pertama Bupati Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu

1. Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik”.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
1.	Risiko strategis Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</li> <li>2. Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan.</li> <li>3. Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah</li> <li>2. Menurunnya kesenjangan antar wilayah</li> <li>3. Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara</li> </ol>	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
2.	Risiko strategis OPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan</li> <li>2. . Meningkatnya Kesejahteraan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menignkatnya peran serta msyarakat dan desa dalam pembangunan</li> <li>2. Meningkatnya penanganan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indeks Desa Membangun ( IDM )</li> <li>- Prosentase PPKS yang terpenuhikebutuhan dasarnya</li> </ul>

No	Konteks	Tujuan Strategis/ Kegiatan	Sasaran	Indikator
		Pemerlu Pelayanan KEsejahteraan SOsial ( PPKS )	sosial	

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I,

*Form 2.a : Penetapan konteks risiko strategis Pemda*

*Form 2.b : Penetapan konteks risiko strategis OPD*

*Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

*Form 2.c : Penetapan konteks risiko operasional Dinas Sosial dan  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

#### 4.2 Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh 19 risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
<b>A</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>
1	Tidak maksimalnya penyelenggaraan public kepada masyarakat desa menyebabkan capaian kinerja program rendah
<b>B</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>
1	Kurang optimalnya tata kelola pemerintahan desa menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum sesuai harapan.
2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak segera terpenuhi kebutuhan dasarnya akan menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial dengan cepat
3	Pemberdayaan masyarakat yang tidak optimal menyebabkan

	perkembangan desa lambat
<b>C</b>	<b>Risiko Operasional/Kegiatan OPD</b>
1	Penyerahan bantuan sosial yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat
2	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat
3	Pelayanan reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan assessment sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga
4	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan narasumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal
5	Tidak adanya bimbingan kepada para keluarga PMKS terlantar menyebabkan sulitnya pendampingan
6	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehensif menyebabkan PMKS terlantar terhambat dalam pemenuhan admistrasi kependudukan.
7	Fasilitasi layanan akses pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan PMKS terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminankesehatan.
8	PMKS terlantar yang tidak diberi kontak layanan pengaduan dan pangkalan data base PMKS terlantar menyebabkan PMKS terlantar tidak cepat tertangani.
9	PMKS terlantar yang tidak mendapatkan layanan kedaruratan menyebabkan kondisi PMKS terlantar semakin parah dan menderita
10	Penelusuran keluarga terhadap PMKS terlantar yang tidak tuntas berakibat kondisi PMKS terganggu psikologi dan kesehatannya.
11	PMKS terlantar membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya.
12	Penyerahan bantuan sosial yang kurang cermat seperti salah nama dan salah alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat
13	Rendahnya kualitas produk yang dikelola KUBE FM
14	Tidak adanya kemitraan antar lembaga menyebabkan penanganan rehabilitasi sosial tidak maksimal

15	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada dipanti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau
16	Kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat
17	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan
18	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemuktahiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi
19	Warga yang tidak mempunyai NIK menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapat bantuan.
20	Tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandang sehingga tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan.
21	Tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan.
22	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik.
23	Tidak adanya fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk.
24	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa.
25	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
26	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
27	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal.
28	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas pengelola Bumdes menyebabkan tata kelola Bumdes kurang optimal.

29	Kurang pahamiya perangkat desa dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaanya
30	Kurang pahamiya perangkat desa dalam fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaanya.
31	Kurang pahamiya perangkat desa dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades desa menyebabkan aset desa bisa hilang/ terbengkalai.
32	Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas anggota BPD menyebabkan pelaksanaan kerja tidak maksimal
33	Terbatasnya anggaran dalam fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan permasalahan terhadap batas desa tidak dapat terfasilitasi
34	Terbatasnya kemampuan kepala desa dalam menyusun LPPDES menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lancar
35	Terbatasnya kemampuan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan menyebabkan perkembangan desa tidak ada perubahan.
36	Terbatasnya program pelestarian hokum adat secara berkelanjutan
37	Masih terbatasnya fasilitasi dalam pengemabangan LMD menyebabkan keberlangsungan LMD tidak aktif
38	Masih terbatasnya fasilitasi pemerintahan desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna menyebabkan TTG tidak bisa dikembangkan di desa.
39	Masih terbatasnya fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat menyebabkan pelaksanaan BBGRM tidak bisa dilaksanakan
40	Masih terbatasnya fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga menyebabkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga tidak bisa dilaksanakan

Rincianidentifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I:

*Form 3.a : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis*

Pemerintah Daerah

Form 3.b : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Strategis OPD

Form 3.c : Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional  
OPD

4.2. Analisis Risiko

4.3.1. Analisis kemungkinan dan dampak risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran II. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survey terhadap ASN di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Dari hasil survei tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

**KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RESIKO**

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1.	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi besar dari pada nol Kemungkinan terjadi sekali dalam 25 tahun	1
2.	Jarang	Probabilitas kurang dari pada 50% tetapi masih cukup tinggi Mungkin terjadi sekali dalam 10 tahun	2
3.	Kadang-kadang	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50% Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun	3
4.	Sering	Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/75% Mungkin terjadi lebih dari sekali dalam setahun	4
5.	Sangat Sering	Kemungkinan terjadi >75% Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

**KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RESIKO**

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan Tidak menimbulkan kerusakan Kerugian kurang dari Rp 50.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum Tidak berdampak pada pencemaran/reputasi Tidak ada/ hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan	1
2	Kecil	Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp 50.000,- sampai Rp 1.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 100.000,- sampai Rp 500.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan	2
3	Sedang	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius Kerugian yang terjadi diatas Rp	3

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		<p>1.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,-</p> <p>Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan</p> <p>Berdampak pada pandangan negative terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>	
4	Besar	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu</p> <p>Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama</p> <p>Kerugian yang terjadi diatas Rp 10.000.000,- sampai Rp 50.000.000,-</p> <p>Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-</p> <p>Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan</p> <p>Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional)</p> <p>Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan</p>	4
5	Luar Biasa/ Bencana	<p>Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu</p> <p>Kerusakan fatal</p>	5

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
		Kerugian yang terjadi Rp 50.000.000,- dan lebih	
		Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan Rp 5.000.000,-	
		Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan	
		Merusak citra institusi dalam skala nasional pergantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak	
		Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	

Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4: Formulir Kertas Kerja Hasil Analisis Risiko*.

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan,

- namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
  - c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
  - d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*:Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

RTP tersebut ditetapkan baik untuk risiko strategis pemerintah daerah, strategis (entitas) OPD, dan operasional. Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g – i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian

sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran IForm 8 (kolom a – f).

*(Form 8 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran IForm 9 (kolom a – e).

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP; Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor Peraturan Bupati Banyumas No 54 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas Nomor 700/5860 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu di pada Tahun 2021 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 6 dan 7*.

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8 (kolom a – f)*. *Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2021 ketika akan merealisasikan RTP.*

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d – g, dan kolom j – k)*.

*Pemantauan dilakukan pada bulan Februari-Maret Tahun 2022.*

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, Februari 2022

**KEPALA DINSOSPERMASDES  
KABUPATEN BANYUMAS**



**Ir. WIDARSO, M.M.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19620728 198901 1 001**



1	Penyerahan bantuan sosial permakanan yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	1	1	3	2	3	3	2	2	2	2	3,10	
2	Penyerahan bantuan sosial sandang yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	2	2	3	4	2	3	2	4	1	3	2	4	2	1	4	4	3	3	3	3	3	1	3	
3	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat	RSO.20.06.10.3	3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	3	2	2	3	2	4	2	1	1	1	2	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2,93
4	Pelayanan Reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan asesmen sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga	RSO.20.06.10.3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	3	3	3	2	2	3	2	1	1	2	3	2	4	2	3	3	3	3	2	3,03	
5	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan nara sumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal	RSO.20.06.10.3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	3	3	2	2	3	2	4	2	1	1	2	4	3	3	2	2	1	3	3	2	2,93		
6	Tidak adanya bimbingan kepada para keluarga PMKS terlantar menyebabkan sulitnya pendampingan	RSO.20.06.10.3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	2	3	2	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	2	2	3	2	2	2	3	2	3,14	
7	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehanship, menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan administrasi kependudukan	RSO.20.06.10.3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	4	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	3	3	2	2,93		

8	Fasilitasi layanan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan]	RSO.20.06.10.3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	1	1	2	1	1	2	2	3	3	2	2	2	3	2	3,00
9	PMKS terlantar yang tidak diberi kontak layanan pengaduan dan pangkalan data base pmks terlantar, menyebabkan PMKS terlantar tidak cepat tertangani	RSO.20.06.10.3	3	3	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	3	2	2	3	1	1	2	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	3	2	2,72
10	PMKS terlantar yang tidakada layanan kedaruratan menyebabkan kondisi PMKS terlantar semakin parah dan menderita	RSO.20.06.10.3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	3	2	4	2	2	2	4	1	2	3	2	4	3,21
11	Penelusuran keluarga terhadap PMKS terlantar yang tidak tuntas berakibat kondisi pmks terganggu psikologi dan kesehatannya	RSO.20.06.10.3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	3	3	2	3	4	4	3	2	4	2	4	1	1	4	2	3	1	1	4	2	3	2	4	3,21
12	PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara,tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya	RSO.20.06.10.3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	4	3	3	3	2	4	1	1	1	4	2	2	4	3	1	1	2	3	2	2,93
13	Penyerahan bantuan sosial kepada difabel/anak yatim yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	3	2	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	2	2	3	1	1	1	4	2	4	3	3	1	1	3	2	2	2,83

14	Penyerahan bantuan sosial sandang kepada anak yatim/difabel yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	3	3	2	1	1	1	4	2	4	3	3	3	3	3,07
15	rendahnya kualitas produksi yang dikelola KUBE FM	RSO.20.06.10.3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	4	4	4	4	2	2	4	3	3	2	2	2	4	4	4	3	1	1	2	2	3,21
16	Tidak adanya kemitraan antar Lembaga menyebabkan penanganan Rehabilitasi sosial tidak maksimal	RSO.20.06.10.3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,69
17	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	RSO.20.06.10.3	3	2	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	4	4	4	4	2	2	1	1	1	2	2	3	2	2	1	1	4	4	2,93
18	kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	RSO.20.06.10.3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,69
19	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	2	2	2	3	2	3	1	1	4	3	3,00

20	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2,93	
21	Warga yang tidak mempunyai NIK, menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	4	2	2	3	2	1	1	3	4	3	3,07	
22	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandangtidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	4	3	3	2	3	4	4	3	2	3	3	2	2	1	1	3	3	2	3,00	
23	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,55
24	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	2	2,66
25	tidak adanya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,59	

26	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1	2	2	2,66
27	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,59
28	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	2	2	2,59	
29	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal	RSO.20.06.10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	1	1	2	2	2,62	

### REKAP KERTAS KERJA DAMPAK

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2022
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )
Urusan Pemerintahan	: Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
OPD yang Dinilai	Dinsospermasdes



1	Penyerahan bantuan sosial permakanaan yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	2	4	3	4	3	3	2	3	2	5	2	4	1	4	4	4	3	3	2	2	2	2
2	Penyerahan bantuan sosial sandang yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	3	1	4	4	2	3	4	2	2	3	4	2	3	2	4	1	4	1	2	4	2	3	4	2	1	2	1
3	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat	RSO.20.06 .10.3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	1	4	4	3	3	3	3	1	3	1
4	Pelayanan Reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan asesmen sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	4	2	4	3	3	1	3	1
5	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan nara sumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	1	1	2	4	3	3	2	2	1	3	1

6	Tidak adanya bimbingan kepada para keluarga PMKS terlantar menyebabkan sulitnya pendampingan	RSO.20.06 .10.3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	2	4	2	3	2	2	2	4	3	4	2	1	1	3	4	3	2	2	3	2	2	2	2
7	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehensif, menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan administrasi kependudukan	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	1	1	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2
8	Fasilitasi layanan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan]	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	3	2	4	3	3	2	2	2	2	2	2
9	PMKS terlantar yang tidak diberi kontak layanan pengaduan dan pangkalan data base pmks terlantar, menyebabkan PMKS terlantar tidak cepat tertangani	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	1	1	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2

10	PMKS terlantar yang tidakada layanan kedaruratan menyebabkan kondisi PMKS terlantar semakin parah dan menderita	RSO.20.06 .10.3	4	2	4	3	2	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	2	2	2	4	1	2	3	2	1
11	Penelusuran keluarga terhadap PMKS terlantar yang tidak tuntas berakibat kondisi pmks terganggu psikologi dan kesehatannya	RSO.20.06 .10.3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	2	4	1	1	1	4	2	3	3	2	1	1	2	1	1	
12	PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara,tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	4	1	1	1	4	2	2	4	3	1	1	2	1	1	
13	Penyerahan bantuan sosial kepada difabel/anak yatim yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06 .10.3	3	2	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	2	3	1	1	1	4	2	4	3	3	1	1	3	1	1	

14	Penyerahan bantuan sosial sandang kepada anak yatim/difabel yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	3	3	3	2	4	2	4	4	4	1	1	3	1
15	rendahnya kualitas produksi yang dikelola KUBE FM	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	2	2	4	3	3	2	2	2	4	4	4	3	1	1	1
16	Tidak adanya kemitraan antar Lembaga menyebabkan penanganan Rehabilitasi sosial tidak maksimal	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
17	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	4	3	4	4	4	4	2	2	4	2	2	2	4	3	4	3	1	1	1	
18	kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	

19	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	2	2	3	2	3	1	1	1
20	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	1
21	Warga yang tidak mempunyai NIK, menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
22	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandangtidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	

23	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	1	1	2	2	3	2	1	1	3	1	
24	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	3	1	1	
25	tidak adanya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
26	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	1	1

27	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
28	Tidak semua desa mendapatkan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
29	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	1	1	1
30	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas pengelola Bumdes menyebabkan tata kelola Bumdes kurang optimal	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	
31	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1	

32	Kurang pemahannya perangkat desa dalam fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1
33	Kurang pemahannya perangkat desa dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades desa menyebabkan aset desa bisa hilang/terbengkalai	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1
34	Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas anggota BPD menyebabkan pelaksanaan kerja tidak maksimal	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1
35	Terbatasnya anggaran dalam fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan permasalahan terhadap batas desa tidak dapat difasilitasi	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	3	4	4	2	3	2	2	2	3	3
36	Terbatasnya kemampuan kepala desa dalam menyusun LPPDES menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lancar	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1

37	Terbatasnya kemampuan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan perkembangan desa tidak ada perubahan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1
38	Terbatasnya program pelestarian hukum adat secara berkelanjutan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	3	4	4	2	2	3	2	2	3	3	2
39	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan LMD menyebabkan keberlangsungan LMD tidak aktif	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	1	3	1
40	Masih terbatas Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan TTG tidak bisa dikembangkan di desa	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	1	1	1	4	2	2	3	2	1	1	3	1
41	Masih terbatas Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat menyebabkan pelaksanaan BBGRM tidak bisa dilaksanakan	RSO.20.06 .10.3	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	1	3	1

42	Masih terbatas Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga menyebabkan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga tidak bisa dilaksanakan	#REF!	3	2	4	2	2	3	4	4	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	4	4	2	2	2	3	2	3	3	2	1
----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan











4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3,7											
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3,7								
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3,7								
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyaj	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3,5



2	Masing - masing pihak dalam organisasi telah mempelekan dan memahami peran dan tanggung jawab masing - masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	2	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3,4					
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	4	4	4	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	2	3	4	4	4	4	3	3	4	3	2	4	3	3	4	4	3,5
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan	3	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3,4		





2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	2	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	4	4	3	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	2	4	2	4	3	4	3	4	3,3
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	2	4	3	2	1	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	2	4	2	3	3	4	3,2						
4	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	2	2	3	4	2	4	4	4	4	4	4	3	2	2	3	3	4	3	2	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	4	2	3	3	4	3,3					
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertang	3	4	3	3	2	2	3	3	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	4	4	4	4	3	3	2	2	3	2	4	3	2	3	4	1	3	2	3	3	2	4	2	3	4	4	3,1								





4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3,6										
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	4	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	2	4	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	2	3	4	3	3,4				
V I I I	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																																					Me mad ai								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3,7



Form 1.b.

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2022			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	LHP Inspektorat Nomor 700/NONPKPT/181/IRBAN.3/ST.080/2021 TANGGAL 27 DESEMBER 2021	Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ( BMD ), Term Of Reference ( TOR ) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Surat Pernyataan dari Perangkat daerah terkait rekomendasi tersebut dan memenuhi data yang diminta	Penyusunan perencanaan kebutuhan BMD, dan operasional kebutuhan biaya pemeliharaan
2	LHP Inspektorat Nomor 700/55.PKPT/146/irban 3/ st.010/2021 tanggal 4 November 2021	PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampuh	Surat Keterangan dari PPTK dan Melengkapi kekurangan administrasi dokumen	Perwujudan peran APIP yang efektif ( Inspektorat Daerah melakukan review atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya)

\*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan

Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

**Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern  
pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Banyumas					
Tahun Penilaian		: 2022					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan SDM (Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab kerjanya)	Kurang memadai	Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ( BMD ), Term Of Reference ( TOR ) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Memadai	Melengkapi kekurangan administrasi dokumen	Kurang memadai	Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ( BMD ), Term Of Reference ( TOR ) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan
2	Perwujudan peran APIP yang efektif ( Inspektorat Daerah meelakukan review atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya)	Kurang memadai	PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampuh	Memadai	Melengkapi kekurangan administrasi dokumen	Kurang memadai	PPTK tidak cermat dan tidak teliti

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023	
Sumber Data	RPJMD Kabupaten BANYUMAS Tahun 2018-2023	
Tujuan Strategis RPJMD	<b>Tujuan 1</b>	<b>Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</b>
	Tujuan 2	Meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
	<b>Tujuan 3</b>	<b>Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>
	Tujuan 4	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian
	Tujuan 5	Meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis
	Tujuan 6	Perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja
	Tujuan 7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat
	Tujuan 8	Menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif
	<b>Tujuan 9</b>	<b>Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</b>
<b>Penetapan konteks Risiko Strategis Pemda</b>	<b>Tujuan 1 Pewujudan tata kelola pemerintahan yang baik</b>	
Nama Dinas Terkait	BKPSDM	
	Inspektorat Daerah	
	Bappedalitbang	
	Sekretariat Daerah	
	Sekretariat DPRD	
	BKAD	
	Dinsospermasdes	
	Dinarpusda	
	Dinkominfo	
	Dindukcapil	
	DPMPTSP	
	Kecamatan	
	<b>Tujuan 3 Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan</b>	
Nama Dinas Terkait	Bappedalitbang	
	Dinsospermasdes	
	Dinakerkop UKM	
	DPMPTSP	
	Kecamatan	
	<b>Tujuan 9 Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya, agama dan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat</b>	
Nama Dinas Terkait	Bakesbang	
	Sekretariat Daerah	
	Bappedalitbang	
	Dinsospermasdes	
Sasaran RPJMD	Sasaran 1.2	Meningkatnya Integritas pemerintahan Daerah
	Sasaran 3.10	Menurunnya kesenjangan antar wilayah
	Sasaran 9.1	Meningkatnya kerukunan masyarakat dan peran pemuda dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara
IKU Sasaran RPJMD	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	a. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran untuk mengurangi kesenjangan; fokus pada Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	
	b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, fokus pada Peningkatan cakupan pelayanan perlindungan sosial dan Penguatan kapasitas kelembagaan sosial	

	c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran untuk mengurangi kesenjangan; fokus pada Peningkatan fungsi pemangku kepentingan untuk bekerjasama berperan dalam program penanggulangan kemiskinan
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p><b>Tujuan 1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan</b></p> <p><b>Sasaran 1.2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Desa</li> <li>2. Program Peningkatan Kerjasama desa</li> <li>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ol> <p><b>Tujuan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )</b></p> <p><b>Sasaran2.1. meningkatnya penanganan sosial</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Sosial</li> <li>2. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>4. Program Penanganan Bencana</li> <li>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> </ol>
	<p>Purwokerto, Februari 2022</p>  <p>KEPALA DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Ir. WIDARSO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19620728 198901 1 001</p>



## PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

## DINSOSPERMASDES

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
OPD yang Dinilai	: Dinsospermasdes		
Sumber Data	Renja Dinsospermasdes Tahun 2022		
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan		
	2. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )		
Program Dinsospermasdes (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	<b>1. Program Penataan Desa</b>		
	a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa		
	b. Program Administrasi Pemerintahan Desa		
	c. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
	<b>2. Program Rehabilitasi Sosial</b>		
	1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
	2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
	<b>3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</b>		
	a. Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		
	b. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
Keluaran/Hasil Kegiatan	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,688
	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100,00%
	-		
Informasi Lain	-		
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan	Indikator	
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	
	Penyediaan sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan	
Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar panti yang menerima bantuan alat bantu	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS Lainnya bukan korban HIV / AIDS dan Napza di luar yang menerima pembinaan	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan sosial	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS lainnya yang menerima fasilitasi Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS lainnya yang menerima layanan rujukan	
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	
Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial	
	Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi	
Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan	
Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang	
Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan psikososial	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang dibina	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah komunitas adat terpencil yang mendapat pemberdayaan sosial	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dunia usaha/lembaga yang terfasilitasi Penerbitan Ijinnya	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang mendapat pembinaan	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah masyarakat dan keluarga yang mendapat pembinaan	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKS/PSKS yang mendapat pembinaan	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah petugas dan pendamping sosial mendapat pembinaan	
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi sarana prasarana desa	
Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama yang terfasilitasi	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi	
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan keuangan desa	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan	
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan	
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	
Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa	
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	

Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina	
Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah lembaga usaha ekonomi masyarakat desa yang dibina (BUMDES dan Pasar Desa)	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	
		<p>Purwokerto, Februari 2022</p>  <p>KEPALA DINSOSPERMASDES KABUPATEN BANYUMAS</p> <p>Ir. WIDARSO, MM. Pembina Utama Muda NIP. 19620728 198901 1 001</p>



No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	K
		Persentase penduduk miskin	Sumber kemiskinan yang tidak segera ditangani akan menyebabkan angka kemiskinan tidak segera turun serta akan menyebabkan permasalahan sosial lainnya	RSP.20.06.10.2	Kepala Daerah	Program-program penanggulangan kemiskinan tidak dilaksanakan dengan efektif, terarah dan terpadu	I	C	Masyarakat tidak segera terbebas dari kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya	1. Kepala Daerah 2. Masyarakat 3. OPD Terkait

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam:

Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam:

Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi



	Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan	Prosentase desa yang meningkat statusnya	Pemerintah desa yang tidak menyelenggaraakan pemerintah desa sesuai ketentuan undang undang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat desa terganggu	RSO.20.06.10.4	Kepala Dinsospermasdes	Rendahnya kapasitas SDM pemerintahan desa	I	C	Pelayanan kepada masyarakat desa rendah kualitasnya	1.Kepala Dinsospermasdes 2. Kepala Desa 3. Penerima Manfaat
	Meningkatnya penanganan sosial	Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) terlindungi	Penanganan untuk kemandirian PMKS yang tidak cukup menyebabkan banyak PMKS yang tidak dapat mandiri	RSO.20.06.10.5	Kepala Dinsospermasdes	Kapasitas SDM yang masih rendah, monev yang kurang dan sumber pendanaan yang minim	I/E	C/UC	Sedikitnya PMKS yang mandiri	1.Kepala Dinsospermasdes 2. Kepala Desa 3. Penerima Manfaat
		Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) terabilitasi	Penanganan untuk perlindungan PMKS yang tidak cukup menyebabkan banyak PMKS yang tidak terlindungi		Kepala Dinsospermasdes	Kapasitas SDM yang masih rendah dan sumber pendanaan yang minim	I/E	C/UC	Sedikit PMKS yang terlindungi	
		Prosentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) Nilai kondisi makam pahlawan terhadap standar nasional	Tidak adanya pemberian santunan kepada anak yatim/difabel dapat menyebabkan ketelantaran		Kepala Dinsospermasdes	Sumber pendanaan yang minim	E	UC	Banyak anak yatim dan difabel yang mengalami ketelantaran	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

## Formulir Kertas Kerja Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Nama OPD	: Dinsospermasde
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Tujuan Strategis	1. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan 2. Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS )
Sasaran strategis OPD	- Meningkatnya peran serta masyarakat dan desa dalam pembangunan - meningkatnya penanganan sosial
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Dinsospermasdes

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	Perencanaan	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat akan menyebabkan terjadinya salah sasaran penyelenggaraan bantuan sosial dalam penyediaan permakanan	ROO.20.06.10.1	Kepala Dinsosperm asdes	Database calon penerima manfaat kurang valid	Internal	C	calon penerima tidak tepat sasaran	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaksanaan	Penyerahan bantuan sosial permakanan yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Internal	C	Bansos tidak sampai ke penerima	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Penatausahaan	Penerimaan bantuan sosial harus kepada penerima manfaat sesuai nama dan alamat, jika diwakilkan bisa terjadi penyimpangan bansos		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan dilakukan tidak	Internal	C	Bansos tidak sampai ke penerima	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan penyaluran bansos berpotensi terjadinya ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang tidak segera diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia	Internal	C	Penyaluran bansos tidak terpantau dan tidak ada evaluasi lebih lanjut	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak dapat dilakukan pemantauan secara menyeluruh	Internal	C	Tidak diketahui penerima manfaat secara menyeluruh	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
2	Penyediaan sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan sandang	Perencanaan	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat akan menyebabkan terjadinya salah sasaran penyaluran bantuan sosial dalam penyediaan sandang	ROO.20.06.10.2	Kepala Dinsosperm asdes	Database calon penerima manfaat kurang valid	Internal	C	calon penerima tidak tepat sasaran	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaksanaan	Penyerahan bantuan sosial sandang yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Internal	C	Bansos tidak sampai ke penerima	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Penatausahaan	Penerimaan bantuan sosial harus kepada penerima manfaat sesuai nama dan alamat, jika diwakilkan bisa terjadi penyimpangan bansos		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan dilakukan tidak	Internal	C	Bansos tidak sampai ke penerima	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan penyaluran bansos berpotensi terjadinya ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang tidak segera diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia	Internal	C	Penyaluran bansos tidak terpantau dan tidak ada evaluasi lebih lanjut	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak dapat dilakukan pemantauan secara menyeluruh	Internal	C	Tidak diketahui penerima manfaat secara menyeluruh	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar menerima bantuan alat bantu	Perencanaan	Kesalahan dalam asesmen terhadap jenis disabilitas dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pemanfaatan alat bantu sesuai dengan kebutuhan klien	ROO.20.06.10.3	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya kemampuan SDM	Internal	C	Kesalahan dalam pemanfaatan alat bantu disabilitas	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaksanaan	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat		Kepala Dinsosperm asdes	Adanya kesalahan dalam pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu	Internal	C	Penerima manfaat tidak bisa menggunakan alat bantu sesuai dengan kebutuhan	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Penatausahaan	Pemilihan jenis alat bantu dan ukuran harus dilakukan secara cermat, agar tidak terjadi kesalahan		Kepala Dinsosperm asdes	Pengukuran tidak dilakukan secara teliti	Internal	C	Bisa terjadi perubahan ukuran yang berdampak terhadap penambahan biaya	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan alat bantu disabilitas berpotensi terjadinya ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang tidak segera diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan monev	Internal	C	Kebutuhan alat bantu tidak bisa maksimal dimanfaatkan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan	Internal	C	Tidak ada rencana perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PPKS terlantar mendapat pelayanan reunifikasi	Perencanaan	Perencanaan reunifikasi yang tidak dilakukan secara terpadu berakibat terjadinya keterlambatan dalam implementasi	ROO.20.06.10.4	Kepala Dinsosperm asdes	Masih adanya kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait dalam reunifikasi	eksternal	UC	Proses reunifikasi tidak lancar	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes

			Pelaksanaan	Pelayanan Reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan asesmen sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga		Kepala Dinsosperm asdes	Dalam melakukan asesment perlu melibatkan instansi lain	eksternal	UC	Penerima manfaat tidak cepat dilakukan reunifikasi ke lingkungan masyarakat	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Penatausahaan	Hasil asesmen kebutuhan dalam reunifikasi keluarga yg tidak tepat, dapat berakibat PMKS sulit beradaptasi dan berinteraksi		Kepala Dinsosperm asdes	Masih kurang profesionalnya petugas	Internal	C	Reunifikasi tidak dapat dilakukan secara maksimal	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan pemberian layanan reunifikasi keluarga dapat berakibat terjadinya ketidaktepatan waktu dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang tidak segera diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan monev	Internal	C	Kebutuhan alat bantu tidak bisa maksimal dimanfaatkan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan	Internal	C	Tidak ada rencana perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Perencanaan	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat bagi orang terlantar menyebabkan terjadinya salah sasaran dalam pemberian bimbingan	ROO.20.06.10.5	Kepala Dinsosperm asdes	Ketidakkuratan petugas dalam melakukan verifikasi dan validasi data pmks	Internal	C	Database penerima manfaat kurang akurat	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaksanaan	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan nara sumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal		Kepala Dinsosperm asdes	Petugas salah memilih tempat dan narasumber yang tepat	Internal	C	Tidak mendapatkan output dan outcome yang maksimal	Pemerintah Daerah, Masyarakat

			Penatausahaan	Hasil asesmen kebutuhan dalam bimbingan dan pelatihan yg tidak tepat,dapat berakibat dalam penyediaan alat peraga,alat bantu dan kebutuhan dasar lainnya		Kepala Dinsosperm asdes	petugas kurang cermat dalam memilih peralatan yang sesuai dengan kebutuhan	Internal	C	penerima manfaat tidak bisa menyerap dan praktek secara maksimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan kegiatan berpotensi terjadinya ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan bimbingan dapat menyebabkan tidak dapat mengetahui perkembangan penerima manfaat yang sdh diberikan bimbingan atau pelatihan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan movev	Internal	C	Kebutuhan alat bantu tidak bisa maksimal dimanfaatkan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan	Internal	C	Tidak ada rencana perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
6	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS terlantar yang menerima fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Perencanaan	PMKS terlantar yang tidak mempunyai identitas kependudukan,tidak bisa memiliki jaminan kesehatan, KK, KTP, Surat Nikah dan KIA	ROO.20.06.10.7	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya fasilitasi dari instansi lain	eksternal	UC	Database PMKS terlantar tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes, PMKS
			Pelaksanaan	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehanship, menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan administrasi kependudukan		Kepala Dinsosperm asdes	PMKS terlantar tidak paham dalam mengurus identitas diri	Internal	C	PMKS terlantar tidak mempunyai identitas diri	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes Masyarakat
			Penatausahaan	Petugas tidak turun langsung mengecek kondisi PMKS terlantar		Kepala Dinsosperm asdes	petugas menggunakan data sekunder	Internal	C	data tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan kegiatan berpotensi terjadinya ketidakvalidan dalam penyiapan data base PMKS terlantar		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap hasil fasilitasi pelaksanaan fasilitasi pembuatan identitas terhambat		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan movev	Internal	C	Kebutuhan alat bantu tidak bisa maksimal dimanfaatkan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan	Internal	C	Tidak ada rencana perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
7	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS terlantar yang menerima Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Perencanaan	PMKS terlantar yang tidak diberikan Fasilitasi layanan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan	ROO.20.06.10.8	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya fasilitasi dari instansi lain	eksternal	UC	Database PMKS terlantar tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes, PMKS
			Pelaksanaan	Fasilitasi layanan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan		Kepala Dinsosperm asdes	PMKS terlantar tidak paham dalam mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Internal	C	PMKS terlantar tidak terpelihara dengan baik	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes Masyarakat
			Penatausahaan	tidak adanya fasilitasi terhadap PMKS terlantar menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan jaminan kesehatan dan kebutuhan pendidikan		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan PMKS terlantar masih dilakukan secara manual, waktu relatif lama	Internal	C	data tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan kegiatan berpotensi terjadinya ketidakvalidan dalam penyiapan data base PMKS terlantar		Kepala Dinsosperm asdes	petugas tidak segera membuat laporan	Internal	C	laporan tidak tepat waktu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap hasil fasilitasi perkembangan PMKS terlantar terpenuhi kebutuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan penerima manfaat yang sudah diberikan bimbingan atau pelatihan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk melakukan movev	Internal	C	Kebutuhan pendidikan dan kesehatan dasar tidak terpenuhi	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya SDM untuk melakukan pemantauan	Internal	C	Tidak ada rencana perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
8	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS terlantar yang menerima layanan rujukan	Perencanaan	PMKS terlantar yang tidak diberikan fasilitas layanan rujukan ke rumah sakit dan rumah singgah pasien menyebabkan PMKS semakin terlantar dan membahayakan jiwa	ROO.20.06.10.12	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya kerjasama secara jelas dalam layanan rujukan ke rmh sakit dan rumah singgah	Eksternal	UC	Layanan rujukan belum bisa dilakukan secara lancar dan cepat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaksanaan	PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara,tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya		Kepala Dinsosperm asdes	Masih adanya kendala dana hambatan proses penanganan PMKS terlantar dr sisi identitas dan pembiayaan	Eksternal	UC	PMKS terlantar tidak segera tertangani dengan baik	Pemerintah Daerah,Dinsospermasdes,PMKS
			Penatausahaan	Tidak adanya identitas PMKS terlantar menyulitkan penanganan PMKS terlantar		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya identitas PMKS terlantar dan regulasi yang jelas sering terjadi kendala dalam penanganan PMKS terlantar	Internal	C	Penanganan PMKS terlantar tidak cepat dilakukan	Pemerintah Daerah,DinsospermasdesMasyarakat
			Pelaporan	Keterlambatan pelaporan pmks terlantar,		Kepala Dinsosperm asdes	Data identitas tidak lengkap	Internal	C	Menyulitkan proses administrasi dari rumah sakit dan layanan lainnya	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi terhadap hasil fasilitas rujukan dapat menyebabkan tidak dapat mengetahui perkembangan PMKS terlantar tidak terdeteksi dan program rehabilitasi yang diperlukan		Kepala Dinsosperm asdes	Belum terbangun sistem pemantauan dan evaluasi yang baik	Internal	C	Perencanaan program lanjutan kurang optimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	Tindak lanjut tidak dilakukan secara rutin	Internal	C	Progres layanan rujukan tidak terpetakan dengan baik	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

9	Penyediaan Permakanan	Jumlah PPKS bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar panti yang menerima bantuan permakanan	Perencanaan	Kesalahan dalam penetapan penerima manfaat akan menyebabkan terjadinya salah sasaran penyelenggaraan bantuan sosial dalam penyediaan permakanan	ROO.20.06.10.1 3	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya database anak yatim/difabel yang up to date	Internal	C	Penyiapan database kurang akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pelaksanaan	Penyerahan bantuan sosial yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat		Kepala Dinsosperm asdes	Database calon penerima manfaat kurang valid	Internal	C	calon penerima tidak tepat sasaran	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Penatausahaan	Penerimaan bantuan sosial harus kepada penerima manfaat sesuai nama dan alamat, jika diwakilkan bisa terjadi penyimpangan bansos		Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Internal	C	Bansos tidak sampai ke penerima	Pemerintah Daerah, Masyarakat
			Pelaporan	Keterlambatan pembuatan Pelaporan pelaksanaan penyaluran bansos berpotensi terjadinya ketidaktepatan dalam pertanggungjawaban kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak dilakukan pembuatan laporan secara detail	Internal	C	Laporan pertanggungjawaan kurang akuntabel	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan yang tidak segera diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	Pemantauan dan evaluasi tidak dilakukan	Internal	C	sulit melakukan perbaikan program lanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran dan sumber daya manusia	Internal	C	Penyaluran bansos tidak terpantau dan tidak ada evaluasi lebih lanjut	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
12	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah PPKS lainnya bukan korban HIV / Aids dan Napza di luar yang mendapatkan bimbingan sosial	Perencanaan	Penetapan rencana usaha yang tidak sesuai dengan kemampuan SDM menyebabkan perkembangan usaha tidak maksimal	ROO.20.06.10.1 5	Kepala Dinsosperm asdes	Pendataan awal tidak dilakukan secara cermat	Internal	C	Penanganan permasalahan sosial hanya ditangani oleh unsur pemerintah	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			pelaksanaan	rendahnya kualitas produksi yang dikelola KUBE FM		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pada pengelola KUBE FM tentang manajemen UEP	eksternal	UC	Tidak ada dukungan SDM, dana dan sarana dari mitra kerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes

			Penatausahaan	Rendahnya tata kelola organisasi dalam kelompok KUBE, menyebabkan tidak tertib administrasi		Kepala Dinsosperm asdes	Masih kurang profesionalnya petugas	Internal	C	Kemitraan antar Lembaga tidak berjalan sesuai target	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaporan	Pelaporan hasil kerja kelompok yang tidak dibuat secara rutin menyebabkan akuntabilitas tidak tercapai		Kepala Dinsosperm asdes	Masih kurang paham para anggota kelompok	eksternal	UC	Pola kemitraan tidak bisa berjalan secara berkelanjutan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Rendahnya monev berpotensi tidak ada peningkatan kualitas		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya alokasi anggaran dan kemampuan SDM	Internal	C	Peningkatan hasil tidak bisa terukur	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak segera di tindaklanjuti dapat menyebabkan tidak ada perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan lanjutan		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi	Internal	C	Rendahnya progres pola kemitraan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
16	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang bekerjasama dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial	Perencanaan	Masih terbatasnya perencanaan jaringan kemitraan antar lembaga menyebabkan lemahnya strategi penanganan masalah sosial	ROO.20.06.10.16	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya kemitraan antar lembaga	eksternal	UC	Penanganan anak terlantar dalam panti tidak dapat dilakukan secara terencana	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Pelaksanaan	Tidak adanya kemitraan antar Lembaga menyebabkan penanganan Rehabilitasi sosial tidak maksimal		Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya kerjasama antar Lembaga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama	eksternal	UC	Tidak dapat mengetahui progres perkembangan anak dalam panti sosial	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes
			Penatausahaan	Tidak adanya perjanjian kerjasama antar Lembaga menyebabkan kurang kuatnya kemitraan		Kepala Dinsosperm asdes	Masih kurangnya dukungan kerjasama antar Lembaga	eksternal	UC	Penelusuran asal usul dan program pengentasan anak terlantar dalam panti tidak optimal	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes

			Pelaporan	Tidak adanya laporan kerjasama antar Lembaga menyebabkan lemahnya pelaporan pola kemitraan		Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya kerjasama antar Lembaga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama	eksternal	UC	Tertib administrasi dan keuangan tidak tercapai	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Pemantauan dan Evaluasi	Lemahnya pemantauan dan evaluasi dalam kemitraan menyebabkan tidak adanya peningkatan hasil kerjasama		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya alokasi anggaran dan kemampuan SDM	Internal	C	Peningkatan hasil tidak bisa terukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Masih terbatasnya tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan pola kemitraan berjalan stagnan		Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya kesepakatan dalam perjanjian kerjasama	Internal	C	Keberlanjutan panti sosial tidak bisa diketahui	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes
17	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapat perbaikan dan perawatan	Perencanaan								
			Pelaksanaan								
			Penatausahaan								
			Pelaporan								
			Pemantauan dan Evaluasi								
			Tindak lanjut hasil pengawasan								
18	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Perencanaan	Masih terbatasnya data base jumlah anak terlantar dan jumlah panti sosial, menyebabkan pemantauan pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar tidak tuntas	ROO.20.06.10.17	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya database anak terlantar dan jumlah panti	Internal	C	data tidak ter update/termutakhirkan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau		Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya pemantauan terhadap anak terlantar dalam panti sosial	Internal	C	hasil data kurang akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Penatausahaan	Masih rendahnya penataan administrasi dalam panti sosial menyebabkan tidak terkendali operasional panti		Kepala Dinsosperm asdes	Masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan panti sosial anak terlantar	eksternal	UC	kegiatan pendataan kurang optimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak adanya laporan penyelenggaraan panti sosial anak terlantar, menyebabkan rendahnya akuntabilitas pelayanan		Kepala Dinsosperm asdes	Masih rendahnya kesadaran pelaporan operasional panti	eksternal	UC	hasil pendataan yang disajikan tidak mutakhir/tidak terupdate	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Lemahnya pemantauan dan evaluasi dalam kemitraan menyebabkan tidak keberlanjutan operasional dalam panti tidak diketahui		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya alokasi anggaran dan kemampuan SDM	Internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Masih terbatasnya tindak lanjut hasil pengawasan menyebabkan pemantauan anak terlantar dalam pemeliharaan di panti sosial tidak terkontrol dengan baik		Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya kesepakatan dalam perjanjian kerjasama	eksternal	UC	kurang adanya penyelesaian di tingkat bawah	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
19	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang mendapat fasilitasi pendataan	Perencanaan	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan basis data tidak ter update	ROO.20.06.10.18	Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas pendata mengenai teori dan praktek tentang mekanisme verifikasi dan validasi data	internal	C	Warga miskin tidak terdaftar dalam DTKS	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat		Kepala Dinsosperm asdes	lemahnya sumber daya manusia dalam pemahaman teori dan praktek pendataan	internal	C	data tidak ter update/ termutakhirkan sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani.	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

				kesalahan dalam perhitungan anggaran sehingga kegiatan pendataan tidak dapat dilaksanakan secara optimal		Kepala Dinsosperm asdes	kurang telitinya dalam perhitungan anggaran	internal	C	data tidak ter update/ termutakhirkan sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani.	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	rendahnya hasil pendataan yang dilaporkan/disetorkan sehingga data base tidak terupdate		Kepala Dinsosperm asdes	rendahnya kualitas SDM petugas pendata	internal	C	hasil pendataan yang disajikan tidak mutakhir/tidak ter update	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi secara terus menerus dengan tingkat pusat	internal	C	kurang adanya penyelesaian di tingkat bawah	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah fakir miskin yang mendapat bantuan sosial	Perencanaan	Database yang kurang valid menyebabkan masih warga miskin tidak terdaftar dalam DTKS	ROO.20.06.10.1 9	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya sistem pendataan yang baik	internal	C	Warga miskin tidak terdaftar dalam program pengembangan ekonomi	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
		Jumlah pendamping PKH yang difasilitasi	Pelaksanaan	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas pendata mengenai teori dan prakek tentang mekanisme verifikasi dan validasi data serta penanganannya terhadap keluarga miskin	internal	C	data tidak ter update/ termutakhirkan sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani.	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat

			Penatausahaan	kurangnya sinkronisasi pihak terkait mengenai data keluarga miskin yang belum mendapatkan pelayanan		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pertemuan yang intesif antar OPD terkait tentang data keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan	internal	C	Warga miskin tidak tercatat dalam program bantuan pengembangan ekonomi	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaporan	rendahnya hasil pendataan yang dilaporkan/disetorkan sehingga data base tidak terupdate		Kepala Dinsosperm asdes	rendahnya kualitas SDM petugas pendata	internal	C	hasil pendataan yang disajikan tidak mutakhir/tidak terupdate	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi secara terus menerus dengan tingkat pusat	internal	C	kurang adanya penyelesaian di tingkat bawah	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
21	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin penerima bantuan pengembangan ekonomi yang difasilitasi	Perencanaan	Database yang kurang valid menyebabkan masih warga miskin tidak terdaftar dalam usaha pengembangan ekonomi masyarakat	ROO.20.06.10.20	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya sistem pendataan dan regulasi yang jelas	internal	C	Warga miskin tidak mendapatkan bantuan pemakanan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaksanaan	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas pendata mengenai teori dan praxe tentang mekanisme verifikasi dan validasi data terhadap warga yang layak mendapat bantuan ekonomi	internal	C	Warga terlambat mendapatkan bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat

			Penatausahaan	kurangnya sinkronisasi pihak terkait mengenai data keluarga miskin yang belum mendapatkan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya pertemuan yang intensif antar OPD terkait tentang data keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan	internal	C	Warga miskin tidak tercatat dalam program bantuan sosial	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaporan	rendahnya hasil pendataan yang dilaporkan/disetorkan sehingga data base tidak terupdate		Kepala Dinsosperm asdes	rendahnya kualitas SDM petugas pendata	internal	C	Keterlambatan menerima bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi secara terus menerus dengan tingkat pusat	internal	C	penyaluran bansos tidak lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
22	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan makanan	Perencanaan	Database yang kurang valid menyebabkan masih warga miskin tidak terdaftar dalam bantuan sosial	ROO.20.06.10.2 1	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya prioritas warga yang mendapatkan bantuan karena terbatasnya kuota bantuan	internal	C	Warga miskin tidak mendapatkan bantuan sandang	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaksanaan	Warga yang tidak mempunyai NIK, menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan		Kepala Dinsosperm asdes	Warga tidak mengurus identitas diri di Dukcapil	eksternal	UC	Warga terlambat mendapatkan bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Penatausahaan	kurangnya sinkronisasi pihak terkait mengenai data keluarga miskin yang belum mendapatkan fasilitasi bantuan sosial permakanan		Kepala Dinsosperm asdes	Kurangnya informasi warga miskin terhadap administrasi bansos	eksternal	UC	Korban kesulitan bahan sandang yang dibutuhkan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaporan	rendahnya hasil pendataan yang dilaporkan dari warga sehingga data base tidak terupdate		Kepala Dinsosperm asdes	Kurang pahamnya warga miskin terhadap cara lapor untuk mendapatkan bansos	internal	C	Keterlambatan menerima bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat

			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi antar instansi	internal	C	penyaluran bansos tidak lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
23	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sandang	Perencanaan	Database yang kurang valid menyebabkan masih warga miskin tidak terdaftar dalam bantuan sosial	ROO.20.06.10.2 2	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya prioritas warga yang mendapatkan bantuan karena terbatasnya kuota bantuan	internal	C	Penyiapan kebutuhan logistik tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaksanaan	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandangtidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya data Korban bencana yang cepat dan up todate untuk mendapatkan bantuan	eksternal	UC	Warga terlambat mendapatkan bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Penatausahaan	kurangnya sinkronisasi pihak terkait mengenai data keluarga miskin yang belum mendapatkan fasilitasi bantuan sosial sandang		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak siap dalam penanganan bencana secara cepat	eksternal	UC	Korban tidak segera tertangani dalam kebutuhan pangan, sandan dan psikososial	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pelaporan	rendahnya hasil pendataan yang dilaporkan dari warga sehingga data base tidak terupdate		Kepala Dinsosperm asdes	Kurang pahamnya petugas terhadap cara lapor untuk mengirimkan data korban	internal	C	Keterlambatan menerima bansos	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	tidak adanya perbaikan pendataan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi antar instansi	internal	C	penyaluran bansos tidak lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat

24	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah korban bencana yang mendapat pelayanan evakuasi	Perencanaan	Penyiapan database dalam mitigasi bencana yang tidak akurat, menyebabkan sulitnya memperkirakan kebutuhan bantuan logistik bagi korban	ROO.20.06.10.2 3	Kepala Dinsosperm asdes	Kesulitan petugas memetakan mitigasi bencana	internal	C	Perencanaan kebutuhan pemekaran atau perubahan status tidak maksimal	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan		Kepala Dinsosperm asdes	Ketidaksiapan petugas dalam pendataan korban bencana	eksternal	UC	Kemungkinan terjadinya ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan desa	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	kurangnya sinkronisasi dalam pendataan korban bencana menyebabkan kesulitan dalam penyiapan kebutuhan korban		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak siap dalam penanganan bencana secara cepat	eksternal	UC	Pelayanan masyarakat dan pembangunan desa terganggu	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Pelaporan	proses waktu pelaporan data korban menyebabkan, sulitnya mengambil keputusan secara cepat		Kepala Dinsosperm asdes	Kurang pahamnya petugas terhadap cara lapor untuk mengirimkan data korban	internal	C	Penyelenggaraan pemerintahan desa terganggu	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	kurang optimalnya pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pendataan di lapangan sehingga tidak ada progres perbaikan data oleh petugas di desa/kelurahan		Kepala Dinsosperm asdes	pemantauan dan evaluasi belum dapat mencakup semua jumlah desa/kelurahan	internal	C	Perencanaan tidak didukung dengan hasil monev	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	masih lambatnya hasil akhir /keputusan hasil finalisasi pendataan dari pusat sehingga data yang sudah di verval belum dapat digunakan.		Kepala Dinsosperm asdes	kurangnya koordinasi antar instansi	internal	C	Tidak cepat selesainya permasalahan status desa	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
34	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Perencanaan	Penyiapan database perubahan status desa yang tidak akurat menyebabkan tata kelola pemerintahan desa tidak optimal	ROO.20.06.10.2 4	Kepala Dinsosperm asdes	Masih belum lengkapnya database kewilayahan desa	internal	C	Perencanaan kebutuhan Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak maksimal	Desa dan Pemkab

			Pelaksanaan	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik		Kepala Dinsosperm asdes	Perlu tidaknya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	internal	C	Program pencapaian kawasan perdesaan lamban	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Ketidakjelasan status desa menyebabkan hambatan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa		Kepala Dinsosperm asdes	Kesalahan nomenklatur desa menyebabkan tidak bisa mendapatkan alokasi anggaran desa	internal	C	Pengembangan potensi kawasan perdesaan tidak segera terwujud	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Pelaporan status desa yang bermasalah menyebabkan kesulitan dalam pertanggungjawaban administrasi dan keuangan		Kepala Dinsosperm asdes	Status yang tidak segera diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang ada	internal	C	Progres tidak terukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, menyebabkan kendala dalam penyiapan perangkat aturan yang tepat		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Perencanaan tidak didukung dengan hasil monev	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak cepat selesainya permasalahan status desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
37	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan Yang di Fasilitasi	Perencanaan	Penyiapan database Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan tidak akurat menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan tidak terwujud	ROO.20.06.10.25	Kepala Dinsosperm asdes	Masih belum lengkapnya database kewilayahan desa	internal	C	hasil fasilitasi pelayanan kepada perangkat desa kurang memuaskan	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	tidak adanya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	masyarakat tidak terlayani dengan ukuran standar pelayanan prima	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Penatausahaan	Ketidajelasan dukungan pembentukan kawasan perdesaan menyebabkan proses administrasi dan realisasi terhambat		Kepala Dinsosperm asdes	Pembentukan kawasan perdesaan tidak cepat selesai	internal	C	Tidak tercapainya standar pelayanan minimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Pelaporan progress realisasi tidak dibuat menyebabkan kesulitan dalam pertanggungjawaban administrasi dan keuangan		Kepala Dinsosperm asdes	lambat dalam membuat laporan	internal	C	Keterlambatan laporan menghambat penetapan kebijakan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan menyebabkan kendala dalam penyiapan perangkat aturan yang tepat		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak adanya standar ukuran yang jelas dalam pelayanan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tindak lanjut tidak mencapai target	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
38	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan desa	Perencanaan	Perencanaan pembinaan [enyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang konvensional menyebabkan pelayanan kepada perangkat desa tidak cepat dan akurat	ROO.20.06.10.2 6	Kepala Dinsosperm asdes	Petugas masih kurang terampil dalam pemanfaatan teknologi informatika	internal	C	potensi terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa		Kepala Dinsosperm asdes	belum adanya keseimbangan antara prasarana, sarana dan sumber daya manusia	internal	C	Potensi terjadinya kesalahan dan penyimpangan keuangan desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Masih belum adanya keseimbangan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras berikut kemampuan SDM, menyebabkan proses fasilitasi pelayanan administrasi tidak berjalan secara terukur sesuai target		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak tercapainya standar pelayanan minimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Keterlambatan proses pelaporan hasil fasilitasi kepada perangkat desa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan akhir		Kepala Dinsosperm asdes	Masih lambatnya proses pembuatan laporan oleh petugas	internal	C	Keterlambatan laporan menghambat penetapan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

										kebijakan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan administrasi kepada perangkat desa menyebabkan tidak ada perubahan pola layanan yang lebih baik		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak adanya standar ukuran yang jelas dalam pelayanan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya target hasil pengawasan	internal	C	hasil Tindak lanjut tidak mencapai target	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
39	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitas pengelolaan keuangan desa	Perencanaan	Tidak adanya perencanaan fasilitas pengelolaan keuangan desa menyebabkan kendala dalam pembinaan kepada pemerintahan desa	ROO.20.06.10.28	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya dukungan anggaran pembinaan desa	internal	C	Pelayanan masyarakat dan pembangunan desa kurang maksimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Tidak semua desa mendapatkan fasilitas pengelolaan keuangan desa		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan fasilitas pengelolaan keuangan desa	internal	C	Pelayanan kepada masyarakat lebih lamban	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Masih belum adanya keseimbangan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras berikut kemampuan SDM, menyebabkan proses fasilitas pengelolaan keuangan desa tidak berjalan secara terukur sesuai target		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM, sarana penunjang dan anggaran	internal	C	Kurang lancarnya proses pelayanan administrasi kepada masyarakat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Keterlambatan proses pelaporan hasil fasilitas kepada perangkat desa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan akhir		Kepala Dinsosperm asdes	Masih lambatnya proses pembuatan laporan oleh petugas	internal	C	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas pelayanan administrasi kepada perangkat desa menyebabkan tidak ada perubahan pola layanan yang lebih baik		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya target hasil pengawasan	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
40	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	Perencanaan	Tidak adanya perencanaan dalam pemberian bimbingan kepada aparatur pemerintahan desa menyebabkan kurang optimalnya pelayanan administrasi desa kepada masyarakat	ROO.20.06.10.29	Kepala Dinsosperm asdes	pelayanan yang tidak didukung sistem administrasi yang memadai	internal	C	Progres perkembangan Bumdes tidak ditetapkan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal	0	Kepala Dinsosperm asdes	Aparatur Pemerintah Desa tidak menguasai penyelenggaraan pemerintahan desa	internal	C	Pembinaan Bumdes tidak bisa dilakukan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Tidak dilakukannya pemetaan masalah terhadap desa yang kurang memahami dalam penyelenggaraan pemerintahan desa menyebabkan adanya ketimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	0	Kepala Dinsosperm asdes	masih terbatasnya kemampuan penyiapan SDM dan peralatan pendukung	internal	C	Bumdes tidak bisa berkembang dan maju	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan pembinaan, menyebabkan tidak akuntabel dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan	0	Kepala Dinsosperm asdes	kelalaian petugas dalam pembuatan laporan	internal	C	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap desa yang sudah mendapatkan pembinaan menyebabkan tidak diketahui progres kemajuan penyelenggaraan pemerintahan desa		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	kelalaian petugas dalam proses tindak lanjut	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
41	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Bumdes dan lembaga kerjasama anatar desa yang mendapat pembinaan	Perencanaan	Tidak dilakukannya pemetaan masalah pada operasional BUMDES menyebabkan tata kelola Bumdes tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	ROO.20.06.10.30	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya pemahaman tentang operasional Bumdes	internal	C	Potensi kesalahan dalam pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas pengelola Bumdes menyebabkan tata kelola Bumdes kurang optimal	0	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	proses pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kurang berjalan lancar	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Tidak dilakukannya pemetaan masalah terhadap pengelolaan Bumdes yang kurang memahami dalam Tata kelola Bumdes yang baik menyebabkan Bumdes tidak berjalan lancar	0	Kepala Dinsosperm asdes	masih terbatasnya kemampuan penyiapan SDM dan peralatan pendukung	Eksternal	UC	Tidak tercapainya standar pelayanan minimal	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan pembinaan, menyebabkan tidak akuntabel dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan	0	Kepala Dinsosperm asdes	kelalaian petugas dalam pembuatan laporan	internal	C	Keterlambatan laporan menghambat penetapan kebijakan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Bumdes yang sudah mendapatkan pembinaan menyebabkan tidak diketahui progres kemajuan operasional Bumdes		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Tidak adanya standar ukuran yang jelas dalam pelayanan	Pemerintah Daerah, Dinsosperm asdes masyarakat miskin

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	0	Tindak lanjut tidak mencapai target	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
42	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang mengadakan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa	Perencanaan	Tidak dilakukan Perencanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan desa	ROO.20.06.10.3 1	Kepala Dinsosperm asdes	Belum terpetakan dengan baik terhadap permasalahan perangkat desa	internal	C	penyusunan profil desa tidak lengkap	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan perangkat desa	internal	C	proses pelaksanaan fasilitasi penyusunan profil desa kurang berjalan lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Masih belum adanya keseimbangan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras berikut kemampuan SDM, menyebabkan proses fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa tidak berjalan secara terukur sesuai target		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	keterlambatan dalam penyusunan profil desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Keterlambatan proses pelaporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan akhir		Kepala Dinsosperm asdes	Masih lambatnya proses pembuatan laporan oleh petugas	internal	C	Keterlambatan laporan menghambat penetapan kebijakan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitasi pelayanan administrasi kepada perangkat desa menyebabkan tidak ada perubahan pola layanan yang lebih baik		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak adanya standar ukuran yang jelas dalam pelayanan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya target hasil pengawasan	internal	C	tidak mencapai target hasil kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

44	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah desa yang mendapat fasilitasi pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID)	Perencanaan	Tidak dilakukan Perencanaan pembinaan dalam fasilitasi penyusunan profil desa kepada desa menyebabkan terganggunya penyusunan profil pemerintahan desa	ROO.20.06.10.3 2	Kepala Dinsosperm asdes	masih terbatasnya kemampuan perangkat desa	internal	C	Aset desa tidak terencana dengan baik	Desa dan Pemkab
			Pelaksanaan	Kurang pahamnya perangkat desa dalam fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan perangkat desa	internal	C	Pengelolaan aset tidak tertata dan tercatat dengan baik	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Masih belum adanya keseimbangan penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras berikut kemampuan SDM, menyebabkan proses fasilitasi penyusunan profil desa tidak berjalan secara terukur sesuai target		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Kelancaran pelaksanaan validasi dan verifikasi aset desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Keterlambatan proses pelaporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan akhir		Kepala Dinsosperm asdes	Masih lambatnya proses pembuatan laporan oleh petugas	internal	C	Pengelolaan aset terganggu	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan tidak adanya program perbaikan dan pengembangan yang lebih baik		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Tidak adanya standar ukuran yang jelas dalam pelayanan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya target hasil pengawasan	internal	C	tidak mencapai target hasil kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
45	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan pengelolaan aset desa	Perencanaan	Tidak dilakukan Perencanaan pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades kepada desa menyebabkan tidak tertib administrasi pemerintahan desa	ROO.20.06.10.3 3	Kepala Dinsosperm asdes	masih terbatasnya kemampuan perangkat desa dalam manajemen aset desa	internal	C	Sebagian desa menunggu tahun anggaran berikutnya	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades desa menyebabkan aset desa bisa hilang/terbengkalai		Kepala Dinsosperm asdes	terbatasnya perangkat desa dalam penggunaan aplikasi aset desa (sipades)	internal	C	peran BPD dalam bermitra dengan desa tidak maksimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Penatausahaan	Masih terbatasnya SDM dalam penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras ,menyebabkan saat terjadinya gangguan aplikasi dan tidak cepat tertangani		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Operasional anggota BPD tidak lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Keterlambatan pelaporan saat terjadinya gangguan dalam aplikasi Sipades menyebabkan gangguan pendataan aset desa		Kepala Dinsosperm asdes	Masih lambatnya laporan oleh petugas	internal	C	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak adanya pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitas pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades menyebabkan tidak adanya program perbaikan dan pengembangan yang lebih baik		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak cepat direspon hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan keberlanjutan program terganggu		Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya target hasil pengawasan	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
46	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah desa yang Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) nya mendapat pembinaan	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan pemberian Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD menyebabkan kinerja Anggota BPD idak maksimal	ROO.20.06.10.34	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya desa yang bisa dilakukan peningkatan kapasitas	internal	C	Tidak bisa melakukan pemetaan desa yang bermasalah terhadap batas desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas anggota BPD menyebabkan pelaksanaan kerja tidak maksimal	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	belum adanya kebijakan arah peningkatan kapasitas BPD dalam bermitra dengan desa	internal	C	Proses pemecahan masalah batas desa tidak berjalan lancar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Peningkatan Kapasitas Anggota BPD menyebabkan BPD operasional kerja BPD tidak maksimal	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran peralatan	internal	C	Perselisihan warga antar desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan pembinaan, menyebabkan tidak akuntabel dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	petugas lambat dalam menyusun laporan	internal	#REF!	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja BPD menyebabkan peran BPD tidak maksimal dalam membantu penyelenggaraan desa		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
47	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi penegasan batasnya	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan pemberian fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa, menyebabkan tata administrasi kewilayahan desa tidak jelas	ROO.20.06.10.35	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	internal	C	Sebagian kepala desa tidak mampu menyusun laporan secara baik dan benar	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Terbatasnya anggaran dalam fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan permasalahan terhadap batas desa tidak dapat difasilitasi	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	tidak ada penguatan dalam menyelesaikan permasalahan batas desa	internal	C	Potensi desa tertinggal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam memberikan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan penyusunan database permasalahan batas desa tidak tersusun dengan baik	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya alokasi anggaran peralatan	internal	C	desa ketinggalan dalam pelaksanaan tata kelola desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan fasilitasi menyebabkan tidak sulit dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	petugas lambat dalam menyusun laporan	internal	#REF!	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap fasilitasi penegasan dan penetapan batas desa menyebabkan tidak bisa dilakukan perencanaan manajemen kewilayahan desa		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	#REF!	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
48	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah desa yang mendapat pembinaan penyusunan Penyelenggaraan Laporan Pemerintah Desa	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan pemberian Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa menyebabkan kinerja kepala desa tidak maksimal	ROO.20.06.10.36	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran yang memadai	internal	C	Sebagian desa tidak mampu Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Terbatasnya kemampuan kepala desa dalam menyusun LPPDES menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lancar	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Belum semua kades diberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kepala desa	internal	C	Ada sebagian desa tidak bisa berkembang sesuai dengan potensi desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Peningkatan Kapasitas kepala desa untuk menyusun LPPDES menyebabkan kurang lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya arah kebijakan dalam peningkatan kapasitas kepala desa	internal	C	desa ketinggalan dalam penengmbangan wilayahnya	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa, menyebabkan target penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tidak segera terwujud	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	petugas lambat dalam menyusun laporan	internal	#REF!	menghambat proses pemeriksaan internal dan eksternal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap peningkatan kapasitas desa menyebabkan target penyelenggaraan desa tidak segera terwujud		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
49	Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mendapat fasilitas evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan pemberian Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan kinerja kepala desa tidak maksimal	ROO.20.06.10.37	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran yang memadai	internal	C	Pengembangan hukum adat sesuai dengan potensi desa tidak terwujud	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Terbatasnya kemampuan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan perkembangan desa tidak ada perubahan	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Kemampuan pendanaan masing desa berbeda	internal	C	keberadaan warisan hukum adat bisa hilang	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan kurang lancarnya penyelenggaraan pemerintahan desa	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya arah kebijakan dalam Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	internal	C	fasilitas pelestarian hukum adat tidak sesuai potensi desa	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa, menyebabkan target penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tidak segera terwujud	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	petugas lambat dalam menyusun laporan	internal	#REF!	warisan hukum adat tidak terdokumentasi dengan baik	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan target penyelenggaraan desa tidak segera terwujud		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
50	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah masyarakat hukum adat yang di inventarisir	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan dalam Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat menyebabkan pelestarian hukum adat yang ada	ROO.20.06.10.38	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya data base Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	internal	C	Data LMD tidak akurat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Terbatasnya program pelestarian hukum adat secara berkelanjutan	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Pengembangan LMD relatif lamban	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat menyebabkan pengikisan adat istiadat yang sudah berlangsung lama	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya arah dan kebijakan dalam pelestarian hukum adat	internal	C	fasilitasi pelestarian penataan KLKD tidak bisa terwujud	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan Fasilitas PIdentifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat menyebabkan dokumentasi warisan hukum adat tidak terpelihara dengan baik	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Tidak adanya standar pelaporan	internal	#REF!	Progres perkembangan KLKD tidak bisa diukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat menyebabkan target pelestarian hukum atas terkendala		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
51	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang mendapat pembinaan	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan dalam fasilitasi penataan kelembagaan masyarakat desa menyebabkan kinerja LMD tidak terpantau dengan baik	ROO.20.06.1039	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya data base Identifikasi dan Inventarisasi LMD berbasis aplikasi	internal	C	Potensi desa tidak terdata dengan baik	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan LMD menyebabkan keberlangsungan LMD tidak aktif	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Pengembangan TTG tidak maksimal	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan menyebabkan operasional KLKD tidak berjalan sesuai programnya	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya arah dan kebijakan penetapan alokasi anggaran	internal	C	Pengembangan TTG berjalan lambat	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan Fasilitasi penataan KLKD menyebabkan terhambatnya pertanggungjawaban sesuai ketentuan berlaku	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Belum adanya standar pelaporan dari penyelenggaraan KLKD	internal	#REF!	Progres perkembangan TTG tidak bisa diukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penataan KLKD menyebabkan target program KLKD tidak bisa direncanakan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
55	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	Perencanaan	Tidak dilakukannya perencanaan dalam fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan pengembangan/pemanfaatan TTG tidak terprogramkan	ROO.20.06.10.40	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya data base Identifikasi dan Inventarisasi TTG yang sudah ada di perdesaan	internal	C	Progres perkembangan TTG tidak bisa diukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaksanaan	Masih terbatas Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan TTG tidak bisa dikembangkan di desa	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Penatausahaan	Terbatasnya dukungan sdm dan peralatan dalam Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan pengembangan TTG kurang lancar	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Masih terbatasnya arah dan kebijakan pemanfaatan TTG	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pelaporan	Tidak dibuatnya laporan pelaksanaan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan terhambatnya pertanggungjawaban pengembangan TTG	#REF!	Kepala Dinsosperm asdes	Tidak konsisten dalam pelaporan pelaksanaan TTG di desa	internal	#REF!	Progres perkembangan TTG tidak bisa diukur	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Pemantauan dan Evaluasi	Tidak dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan target program Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan capaian kinerja	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin
			Tindak lanjut hasil pengawasan	Tidak dilakukan proses tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi menyebabkan kesulitan mengetahui penyimpangan pelaksanaan kegiatan		Kepala Dinsosperm asdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	internal	C	Sulit mengukur progres kemajuan suatu program pembinaan	Pemerintah Daerah, Dinsospermasdes masyarakat miskin

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2022

Tujuan Strategis

1, Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat  
Meningkatnya pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat

2.Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat desa

3.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan

Urusan Pemerintahan : Urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis Pemerintah Daerah</b>					
1	Sumber kemiskinan yang tidak segera ditangani akan menyebabkan angka kemiskinan tidak segera turun serta akan menyebabkan permasalahan sosial lainnya	RSP.20.06.10.1	9,10	Kepala Daerah	Program-program penanggulangan kemiskinan tidak dilaksanakan dengan efektif, terarah dan terpadu	Masyarakat tidak segera terbebas dari kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya
<b>II</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>					
1	Pemerintah desa yang tidak menyelenggarakan pemerintah desa sesuai ketentuan undang undang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat desa terganggu	RSO.20.06.10.1	8,69	Kepala Dinsospe rmasdes	Rendahnya kapasitas SDM pemerintahan desa	Pelayanan kepada masyarakat desa rendah kualitasnya
2	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ( PPKS ) yg tidak segera tertangani akan menyebabkan meningkatnya permasalahan sosial dengan cepat	RSO.20.06.10.2	8,28	Kepala Dinsospe rmasdes	Rendahnya tingkat penanganan terhadap PMKS	Permasalahan sosial di masyarakat tidak segera tertanggulangi dan akan semakin berkembang
<b>III</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>					
1	Penyerahan bantuan sosial permakanan yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	8,69	Kepala Dinsospe rmasdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Bansos tidak sampai ke penerima
2	Penyerahan bantuan sosial sandang yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	9,20	Kepala Dinsospe rmasdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Bansos tidak sampai ke penerima
3	Pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu yang salah menyebabkan alat bantu tidak bisa digunakan secara nyaman dan bermanfaat	RSO.20.06.10.3	9,94	Kepala Dinsospe rmasdes	Adanya kesalahan dalam pengukuran dan pemilihan jenis alat bantu	Penerima manfaat tidak bisa menggunakan alat bantu sesuai dengan kebutuhan
4	Pelayanan Reunifikasi keluarga yang tidak dilakukan asesmen sebelumnya berakibat kurang tepat dalam memberikan solusi dalam reunifikasi keluarga	RSO.20.06.10.3	8,69	Kepala Dinsospe rmasdes	Dalam melakukan asesment perlu melibatkan instansi lain	Penerima manfaat tidak cepat dilakukan reunifikasi ke lingkungan masyarakat

5	Pelaksanaan bimbingan yang tidak tepat dalam pemilihan tempat dan nara sumber dapat menjadikan pelaksanaan kurang optimal	RSO.20.06.10.3	9,74	Kepala Dinsospe rmasdes	Petugas salah memilih tempat dan narasumber yang tepat	Tidak mendapatkan output dan outcome yang maksimal
6	Tidak adanya bimbingan kepada para keluarga PMKS terlantar menyebabkan sulitnya pendampingan	RSO.20.06.10.3	8,59	Kepala Dinsospe rmasdes	Tidak adanya program bimbingan menyebabkan penanganan permasalahan keterlantaran tidak cepat teratasi	Para keluarga tidak bisa mendampingi PMKS terlantar secara optimal
7	Fasilitasi administrasi kependudukan yang tidak total/komprehensif, menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan administrasi kependudukan	RSO.20.06.10.3	9,52	Kepala Dinsospe rmasdes	PMKS terlantar tidak paham dalam mengurus identitas diri	PMKS terlantar tidak mempunyai identitas diri
8	Fasilitasi layanan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar tidak dilakukan secara menyeluruh dapat menyebabkan pmks terlantar terhambat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan dan jaminan kesehatan]	RSO.20.06.10.3	7,89	Kepala Dinsospe rmasdes	PMKS terlantar tidak paham dalam mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	PMKS terlantar tidak terpelihara dengan baik
9	PMKS terlantar yang tidak diberi kontak layanan pengaduan dan pangkalan data base pmks terlantar, menyebabkan PMKS terlantar tidak cepat tertangani	RSO.20.06.10.3	10,06	Kepala Dinsospe rmasdes	Masih terbatasnya layanan pengaduan langsung melalui hotline khusus	PMKS terlantar tidak cepat tertangani sesuai dengan kebutuhannya
10	PMKS terlantar yang tidak ada layanan kedaruratan menyebabkan kondisi PMKS terlantar semakin parah dan menderita	RSO.20.06.10.3	9,07	Kepala Dinsospe rmasdes	Belum terbentuknya layanan kedaruratan PMKS terlantar	Penanganan PMKS terlantar tidak cepat dilakukan
11	Penelusuran keluarga terhadap PMKS terlantar yang tidak tuntas berakibat kondisi pmks terganggu psikologi dan kesehatannya	RSO.20.06.10.3	8,59	Kepala Dinsospe rmasdes	Layanan penelusuran keluarga memerlukan sinergi dengan instansi lain	Proses layanan penelusuran keluarga tidak lancar
12	PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan medis dan rumah singgah sementara, tidak segera diberikan pelayanan dapat membahayakan jiwanya	RSO.20.06.10.3	8,19	Kepala Dinsospe rmasdes	Masih adanya kendala dana hambatan proses penanganan PMKS terlantar dr sisi identitas dan pembiayaan	PMKS terlantar tidak segera tertangani dengan baik
13	Penyerahan bantuan sosial kepada difabel/anak yatim yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	9,84	Kepala Dinsospe rmasdes	Database calon penerima manfaat kurang valid	calon penerima tidak tepat sasaran
14	Penyerahan bantuan sosial sandang kepada anak yatim/difabel yang kurang cermat seperti salah nama dan alamat menyebabkan salah sasaran penerima manfaat	RSO.20.06.10.3	10,17	Kepala Dinsospe rmasdes	Pendataan calon penerima manfaat kurang cermat	Bansos tidak sampai ke penerima

15	rendahnya kualitas produksi yang dikelola KUBE FM	RSO.20.06.10.3	6,77	Kepala Dinsospe rmasdes	kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pada pengelola KUBE FM tentang manajemen UEP	KUBE tidak dapat berkembang dengan optimal
16	Tidak adanya kemitraan antar Lembaga menyebabkan penanganan Rehabilitasi sosial tidak maksimal	RSO.20.06.10.3	9,00	Kepala Dinsospe rmasdes	Masih terbatasnya kerjasama antar Lembaga yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama	Tidak ada dukungan SDM,dana dan sarana dari mitra kerja
17	Tidak adanya pemantauan terhadap anak terlantar yang ada di panti sosial menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terpantau	RSO.20.06.10.3	6,77	Kepala Dinsospe rmasdes	Masih terbatasnya pemantauan terhadap anak terlantar dalam panti sosial	Tidak dapat mengetahui progres perkembangan anak dalam panti sosial
18	kesalahan dalam pendataan oleh petugas sehingga hasil basis data kurang akurat	RSO.20.06.10.3	7,45	Kepala Dinsospe rmasdes	kurang telitinya dalam perhitungan anggaran	kegiatan pendataan kurang optimal
19	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani dan mendapatkan penanganan	RSO.20.06.10.3	7,38	Kepala Dinsospe rmasdes	kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas pendata mengenai teori dan prakek tentang mekanisme verifikasi dan validasi data serta penanganannya terhadap keluarga miskin	data tidak ter update/ termutakhirkan sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani.
20	kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin oleh desa/kelurahan sehingga dapat menyebabkan masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani bantuan pengembangan ekonomi	RSO.20.06.10.3	7,73	Kepala Dinsospe rmasdes	kurangnya pemahaman dan kesadaran petugas pendata mengenai teori dan prakek tentang mekanisme verifikasi dan validasi data terhadap warga yang layak mendapat bantuan ekonomi	data tidak ter update/ termutakhirkan sehingga masih banyak keluarga miskin yang belum terlayani.
21	Warga yang tidak mempunyai NIK, menyebabkan tidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06.10.3	7,55	Kepala Dinsospe rmasdes	Warga tidak mengurus identitas diri di Dukcapil	Warga terlambat mendapatkan bansos
22	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran sandangtidak bisa diusulkan untuk mendapatkan bantuan	RSO.20.06.10.3	6,34	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya data Korban bencana yang cepat dan up todate untuk mendapatkan bantuan	Warga terlambat mendapatkan bansos

23	tidak siapnya pendataan korban bencana secara cepat menyebabkan terlambatnya penyaluran bantuan	RSO.20.06.10.3	6,87	Kepala Dinsospe rmasdes	Kesulitan petugas memetakan mitigasi bencana	Penyiapan kebutuhan logistik tidak akurat
24	Jika terjadi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status tanpa memperhatikan kebutuhan desa menyebabkan tata kelola desa tidak berjalan dengan baik	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Perlu tidaknya pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa	Kemungkinan terjadinya ketidakstabilan penyelenggaraan pemerintahan desa
25	tidak adanya Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan menyebabkan pembentukan kawasan perdesaan sulit terbentuk	RSO.20.06.10.3	6,87	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	Program pencapaian kawasan perdesaan lamban
26	Adanya kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa menggunakan teknologi informatika yang tidak diimbangi dengan kecakapan petugas menyebabkan terhambatnya pelayanan administrasi kepada perangkat desa	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	belum adanya keseimbangan antara prasarana, sarana dan sumber daya manusia	masyarakat tidak terlayani dengan ukuran standar pelayanan prima
27	Tidak semua desa mendapatkan fasilitas penyusunan perencanaan pembangunan desa	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	terbatasnya kemampuan SDM dan anggaran	Penyusunan perencanaan pembangunan desa munculnya kesalahan administratif
28	Tidak semua desa mendapatkan fasilitas pengelolaan keuangan desa	RSO.20.06.10.3	6,69	Kepala Dinsospe rmasdes	terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Potensi terjadinya kesalahan dan penyimpangan keuangan desa
29	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa menyebabkan tata kelola pemerintahan desa kurang optimal	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Aparatur Pemerintah Desa tidak menguasai penyelenggaraan pemerintahan desa	Pelayanan kepada masyarakat lebih lamban
30	Kurangnya pembinaan pada peningkatan kapasitas pengelola Bumdes menyebabkan tata kelola Bumdes kurang optimal	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	Pembinaan Bumdes tidak bisa dilakukan
31	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepada desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya kemampuan perangkat desa	proses pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kurang berjalan lancar
32	Kurang pahamnya perangkat desa dalam fasilitasi penyusunan profil desa menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya kemampuan perangkat desa	proses pelaksanaan fasilitasi penyusunan profil desa kurang berjalan lancar

33	Kurang pahamnya perangkat desa dalam pembinaan pengelolaan aset desa dan pelatihan Sipades desa menyebabkan aset desa bisa hilang/terbengkalai	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	terbatasnya perangkat desa dalam penggunaan aplikasi aset desa (sipades)	Pengelolaan aset tidak tertata dan tercatat dengan baik
34	Terbatasnya anggaran peningkatan kapasitas anggota BPD menyebabkan pelaksanaan kerja tidak maksimal	RSO.20.06.10.3	7,90	Kepala Dinsospe rmasdes	belum adanya kebijakan arah peningkatan kapasitas BPD dalam bermitra dengan desa	peran BPD dalam bermitra dengan desa tidak maksimal
35	Terbatasnya anggaran dalam fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa menyebabkan permasalahan terhadap batas desa tidak dapat difasilitasi	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	tidak ada penguatan dalam menyelesaikan permasalahan batas desa	Proses pemecahan masalah batas desa tidak berjalan lancar
36	Terbatasnya kemampuan kepala desa dalam menyusun LPPDES menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan desa kurang lancar	RSO.20.06.10.3	6,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Belum semua kades diberikan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja kepala desa	Potensi desa tertinggal dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
37	Terbatasnya kemampuan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan menyebabkan perkembangan desa tidak ada perubahan	RSO.20.06.10.3	8,09	Kepala Dinsospe rmasdes	Kemampuan pendanaan masing masing desa berbeda	Ada sebagian desa tidak bisa berkembang sesuai dengan potensi desa
38	Terbatasnya program pelestarian hukum adat secara berkelanjutan	RSO.20.06.10.3	8,09	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	keberadaan warisan hukum adat bisa hilang
39	Masih terbatas fasilitasi dalam pengembangan LMD menyebabkan keberlangsungan LMD tidak aktif	RSO.20.06.10.3	7,29	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	Pengembangan LMD relatif lamban
40	Masih terbatas Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna menyebabkan TTG tidak bisa dikembangkan di desa	RSO.20.06.10.3	7,51	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya SDM dan alokasi anggaran	Pengembangan TTG tidak maksimal
41	Masih terbatas Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat menyebabkan pelaksanaan BBGRM tidak bisa dilaksanakan	RSO.20.06.10.3	7,41	Kepala Dinsospe rmasdes	Terbatasnya dukungan peralatan dan alokasi anggaran	pelaksanaan BBRM tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan
42	Masih terbatas Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga menyebabkan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga tidak bisa dilaksanakan	#REF!	#REF!	Kepala Dinsospe rmasdes	Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga tidak bisa dilakukan secara maksimal di setiap desa	Tidak semua wanita berkiprah di Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

## FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I							
1	Kurang perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ( BMD ), Term Of Reference ( TOR ) per kegiatan dan data mengenai perhitungan biaya pemeliharaan	Surat Pernyataan dari pegawai yang kurang disiplin dan Surat Pernyataan Kepala Dins akan mengambil tindakan kepada pegawai yang tidak disiplin	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan secara berkala	Kepala Dinas	Triwulan IV 2021
2	PPTK tidak cermat dalam perencanaan kegiatan teknis yang diampuh	Melengkapi kekurangan administrasi dokumen	E	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembinaan pengawasan dan sosialisasi hasil pengawasan secara berkala	Kepala Dinas	Triwulan IV 2021

## Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan pengendalian yang sudah ada/sudah dilakukan

Kolom d diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian yang ada:

- (1) E apabila Efektif;
- (2) TE apabila Tidak Efektif.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,
- (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

